

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konservasi kawasan mempunyai tujuan untuk melindungi keragaman hayati dan pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan (*sustainable use*). Wilayah yang menjadi kawasan konservasi dapat terdiri dari daratan, daratan dan lautan atau seluruhnya terdiri dari wilayah perairan. Adanya kawasan konservasi secara tidak langsung akan melindungi seluruh ekosistem, termasuk habitat dan organisme yang hidup di dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 21 tentang Penataan Ruang, pengertian dari Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dan memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Salah satu kawasan lindung yang memiliki multifungsi adalah kawasan pantai berhutan bakau mangrove (Muhammad, 2012).

Negara Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia dengan berbagai manfaat dan fungsi bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi. Namun, keberadaan ekosistem mangrove di Indonesia saat ini benar-benar telah pada posisi yang sangat mengkhawatirkan. Dalam tiga dekade terakhir terjadi penurunan secara drastis luas kawasan hutan mangrove di Indonesia dari seluas 4,25 juta ha menjadi 3,7 juta ha dan hanya sekitar 2,1 juta ha dalam keadaan utuh (Balitbang Kehutanan, 2010). Kementerian Kehutanan (2013) juga menyebutkan luas hutan mangrove Indonesia sekitar 3,2 juta ha dengan jumlah spesies yang ditemukan sebanyak 75 spesies. Sedangkan data terakhir luas mangrove Indonesia dalam waktu dua puluh tahun terakhir telah berkurang hampir 1,1 juta ha atau sekitar 75 %.

Hutan mangrove adalah daerah yang terletak antara daratan dan lautan. Keberadaan hutan tersebut tidak hanya untuk kepentingan kehutanan, tetapi juga untuk kepentingan lahan pertambakan, perkebunan dan pertanian. Lautan adalah ekosistem perairan asin yang luas dengan potensi perikanan yang melimpah. Sedangkan daratan adalah bagian permukaan bumi yang kering maupun yang masih terendam air dengan potensi pertanian. Hutan mangrove yang berada pada peralihan antara dua bentang alam yang berbeda tersebut harus diperhatikan dalam perencanaan pengelolaan secara lestari (Kustanti, 2011).

Batas wilayah pesisir ke arah darat pada umumnya adalah jarak rata-rata pasang tertinggi (*mean high tide*) dan batas ke arah laut adalah sesuai dengan batas yurisdiksi propinsi. Untuk kepentingan pengelolaan batas ke arah darat dari suatu wilayah pesisir dibagi menjadi dua macam, yaitu batas untuk wilayah perencanaan (*planning zone*) dan batas untuk wilayah pengaturan (*regulation zone*). Wilayah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daerah daratan (hulu) yang terdapat kegiatan manusia yang dapat menimbulkan dampak secara nyata terhadap lingkungan dan sumberdaya di pesisir (Rudianto, 2007).

Sebanyak 440 kabupaten/kota dari total 495 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia berada di wilayah pesisir. Kabupaten/kota tersebut masing-masing memiliki karakteristik fisik wilayah pesisir berbeda satu sama lain (KKP, 2011). Kabupaten Trenggalek merupakan wilayah pesisir di Propinsi Jawa Timur yang memiliki sumberdaya perikanan yang potensial untuk dikembangkan. Panjang Pantai Selatan Trenggalek ± 96 km di mana sebagian besar pantainya berbentuk teluk yang terdiri dari Teluk Panggul, Teluk Munjungan dan yang paling besar adalah Teluk Prigi yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Watulimo. Selain itu, kawasan Teluk Prigi merupakan daerah perlindungan laut (*fish sanctuary*).

Kecamatan Watulimo memiliki 3 desa pesisir, yaitu Tasikmadu, Prigi dan Karanggandu. Desa-desa ini langsung berbatasan dengan Teluk Prigi yang menjadi basis kegiatan perikanan yang aktivitasnya paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan pantai lainnya di Kabupaten Trenggalek. Kecamatan Watulimo akhir-akhir ini namanya juga dikenal dengan dibangunnya jembatan jalan lintas selatan (JLS) sebagai penghubung lalu lintas di kawasan pantai Selatan. JLS tersebut melewati kawasan konservasi mangrove yang berada di Pantai Cengkong. Lokasi konservasi mangrove sangat strategis, karena terletak berhadapan langsung dengan Pantai Cengkong yang berada di sekitar Teluk Prigi. Pantai Cengkong ini termasuk dalam wilayah administratif Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.

Aktivitas kegiatan perikanan yang ada di Pantai Cengkong Kecamatan Watulimo sering kali terjadi benturan kepentingan. Pada tahun 2003 terjadi alih fungsi hutan mangrove akibat kepentingan masyarakat, seperti penebangan mangrove untuk kayu bakar dan arang, dan perusakan mangrove untuk lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu, terjadinya tumpang tindih pemanfaatan lahan antara sektor perikanan dan sektor kehutanan karena tidak adanya kejelasan pengaturan pengelolaan dan ketidak pahaman para *stakeholder* terhadap kebijakan pengelolaan mangrove mengakibatkan terjadinya konflik kewenangan dalam pemanfaatan potensi dan pelestarian mangrove. Hal ini membawa dampak pada eksploitasi sumberdaya hayati yang ada, yaitu rusaknya hutan mangrove di Pantai Cengkong yang mempunyai peran penting dalam mendukung ekosistem pesisir terutama di kawasan pesisir Kecamatan Watulimo. Dengan demikian, pemanfaatan kawasan pesisir dapat membawa suatu perubahan pada ekosistem di dalamnya.

Konservasi mangrove Pantai Cengkong sangat mendukung daerah perlindungan laut (*fish sanctuary*) yang masih berada dalam satu kawasan

pesisir di Kecamatan Watulimo. Namun, pengembangan konservasi mangrove di Pantai Cengkong Kecamatan Watulimo belum optimal, karena termasuk daerah wisata yang baru saja dibuka. Selain itu, minimnya fasilitas penunjang yang tersedia serta kurangnya perawatan fasilitas yang ada juga dapat menjadi penyebab minimnya kunjungan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya strategi untuk mengelola ekosistem mangrove yang diakui oleh berbagai pihak/pemangku peran dan dapat digunakan sebagai dasar dalam kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove ditingkat pusat maupun sampai tingkat daerah. Dengan demikian, diharapkan potensi perikanan yang ada di Kecamatan Watulimo dapat dioptimalkan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan di daerah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Kecamatan Watulimo sebagai daerah kawasan pesisir tidak lepas dari berbagai permasalahan, terutama pengelolaan potensi sumberdaya alam. Pengelolaan kawasan mangrove yang belum memadai dan kurangnya perhatian dari masyarakat terhadap pengembangan wilayah pesisir, menyebabkan belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi dan kelestarian pesisir serta lingkungannya. Untuk mengantisipasi permasalahan dan dampak negatif yang terjadi dalam pengelolaan, maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana rencana strategi kawasan konservasi mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Watulimo ?
- 2) Bagaimana arahan strategi pengelolaan mangrove untuk pengembangan konservasi mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Watulimo ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menentukan rencana strategi kawasan konservasi mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Watulimo.
- 2) Merumuskan arahan strategi/kebijakan pengelolaan yang tepat untuk pengembangan kawasan konservasi mangrove menuju wilayah pesisir dan lautan terpadu lestari di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan ini adalah :

- ⇔ Bagi Peneliti & Akademisi : Penelitian ini dapat dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian di bidang yang sama ataupun penelitian lanjut.
- ⇔ Bagi masyarakat umum : Khususnya masyarakat Kecamatan Watulimo, hasil study dapat memberikan wawasan masyarakat mengenai bagaimana mengelola kawasan hutan mangrove dan fungsi penting pelestarian hutan mangrove di Pantai Cengkong.
- ⇔ Bagi instansi terkait : Sebagai bahan pertimbangan mengenai perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi mangrove menuju wilayah pesisir dan lautan terpadu lestari bagi pengelola dan pemerintah Kabupaten Trenggalek.

1.5 Tempat dan Waktu

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Konservasi Mangrove Pantai Cengkong, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur mulai bulan Desember 2013 sampai dengan Maret 2014.

1.6 Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan penelitian ini meliputi penyusunan proposal, survey lapang, pengambilan data sekunder dan primer, pengolahan data, dan penyusunan laporan penelitian (Tabel 1).

Tabel 1. Agenda Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan														
		Desember 2013			Januari 2014				Februari 2014			Maret 2014				
		II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Penyusunan Proposal															
2.	Survey Lapang															
3.	Pengambilan Data Sekunder															
	a. Data keadaan umum kawasan dan potensi sumberdaya pesisir															
	b. Data penunjang lainnya															
4.	Pengambilan Data Primer															
	a. Kuisisioner mengenai isu-isu strategis terhadap <i>stakeholder</i>															
	b. Wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan konservasi mangrove															
5.	Pengolahan Data															
	a. Analisis SWOT															
	b. Analisis AHP															
6.	Penyusunan Laporan															

Keterangan :



: agenda pelaksanaan penelitian